

KONSEPSI GOOD URBAN GOVERNANCE SEBAGAI KERANGKA PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN

Damaris Bernike Bellastuti^{1*}, Reza Fathurrahman²

^{1,2}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

*Corresponding author: damaris.bernike@ui.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 26, 2023

Revised: August 09, 2023

Accepted: August 28, 2023

Keywords:

Urbanization; Governance;
Good Urban Governance;
Sustainable Development.

ABSTRACT

Urban development due to urbanization requires urban management concepts and practices that lead to an approach based on sustainable development. The city governance model called good urban governance ensures long-term sustainable development is carried out with a multidimensional approach to improve the welfare and quality of life of all urban communities, including the participation and involvement of various stakeholders, city management and administration, as well as transparency and public accountability. Although this approach is not entirely new, it remains open to new challenges related to meeting human needs in urban environments. This article presents the theoretical basis of the principles of good urban governance as well as selected practices of good urban governance approaches in Singapore based on literature studies. The results of the analysis show that the idea of good urban governance can be used as a strategy to improve the quality of life in cities where sustainable growth and inclusive urban policies are threatened by rapid urbanization. There are a number of recommendations for further research related to the good urban governance approach that can be carried out in the future.

PENDAHULUAN

Urbanisasi adalah isu dan fenomena global yang tak terhindarkan. Fakta menunjukkan bahwa pada awal tahun 1950-an, sekitar 66% penduduk dunia tinggal di pedesaan. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa populasi dunia kini telah mencapai pada delapan miliar

orang, di mana 4,45 miliar, atau sekitar 56%, saat ini tinggal di perkotaan. Pada tahun 2050, diperkirakan sekitar 68% populasi dunia akan hidup di daerah perkotaan dan sebagian besar pertumbuhan terjadi terutama di negara-negara Asia (Ayele & Tarekegn, 2020). Seperti di seluruh dunia,

Singapura juga mengalami urbanisasi dengan cepat sejak tahun 1950-an dengan 100% populasi sekarang didefinisikan sebagai “perkotaan” (Tan et al., 2021). Populasi juga tumbuh pesat dengan peningkatan dari sekitar 1 juta orang pada tahun 1950 menjadi lebih dari 5 juta pada tahun 2010. Kini, Singapura menjadi negara yang memiliki salah satu ekonomi dan standar hidup paling maju di dunia.

Selama bertahun-tahun, urbanisasi telah dikaitkan dengan perubahan ekonomi dan sosial yang besar. Misalnya, tinggal di kota dikaitkan dengan tingkat melek huruf dan pendidikan yang lebih tinggi, kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke layanan sosial dan peluang yang lebih besar untuk partisipasi budaya dan politik. Gaya hidup dan ‘cahaya terang’ perkotaan menarik orang berbondong-bondong bermigrasi ke wilayah perkotaan karena dianggap memiliki potensi untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Kepadatan penduduk perkotaan membuat pemerintah dan utilitas dalam menyediakan barang dan jasa penting secara lebih murah dan mudah (Cobbinah et al., 2015). Misalnya, pelayanan dasar seperti air bersih dan listrik, jaringan komunikasi dan transportasi dapat disediakan dengan tenaga dan biaya minimal per orang.

Seiring dengan manfaatnya, konsentrasi penduduk dalam jumlah besar di perkotaan memiliki eksternalitas negatif, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, tunawisma dan perluasan permukiman liar, layanan dan infrastruktur yang tidak memadai, layanan kesehatan dan pendidikan yang buruk, serta tingkat polusi yang tinggi. Pertumbuhan populasi yang cepat dan yang tidak direncanakan menciptakan *urban sprawl* dengan konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang merugikan (Pagliarin, 2018). Laju pertumbuhan perkotaan sering mempengaruhi kemampuan pemerintah lokal dan nasional untuk menyediakan layanan dasar seperti perumahan, persediaan air dan pengelolaan limbah. Selain itu, kota dapat menyebabkan dan memperkuat eksklusi sosial dengan menyangkal manfaat kehidupan perkotaan bagi kaum miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya (Sandholz & Sandholz, 2017).

Kebutuhan untuk menghentikan laju urbanisasi yang disebabkan oleh industrialisasi, globalisasi, dan laju pertumbuhan penduduk yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota-kota adalah masalah penting yang menjadi perhatian sebagian besar pemerintah nasional di seluruh dunia (Obianyo et

al., 2021). Jika dikelola dengan baik, tren urbanisasi dapat menghasilkan "siklus yang baik" atau jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan mengakibatkan "spiral setan" yang berakibat penurunan standar hidup (Brillantes Jr & Flores, 2012). Urbanisasi yang cepat dan tata kelola yang buruk menciptakan kondisi kota yang tidak menguntungkan bagi semua orang.

Urbanisasi telah menjadi masalah besar bagi pengelolaan kota yang efektif dan pembangunan berkelanjutan. *The United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro tahun 1992 mengadopsi pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma pembangunan yang baru dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan sebagai komponen pembangunan jangka panjang yang saling bergantung dan saling mendukung (Mohamed et al., 2020). Pembangunan berkelanjutan menekankan pendekatan partisipatif, *multi-stakeholder* untuk pembuatan dan implementasi kebijakan, memobilisasi sumber daya publik dan swasta untuk pembangunan dan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan energi dari semua kelompok sosial yang peduli dengan masa depan planet ini dan orang-orangnya (Akinluyi & Adedokun, 2014). Berkaitan dengan pertumbuhan

kota, pembangunan berkelanjutan menyiratkan kemampuan daerah perkotaan untuk terus mencapai tingkat kualitas hidup yang diinginkan masyarakat, tanpa mengurangi pilihan generasi sekarang dan mendatang.

Skala dan kompleksitas masalah perkotaan, serta peningkatan perkembangan dan pertumbuhan kota membuat pengelolaan perkotaan menjadi tugas yang sulit. Pembangunan perkotaan modern menuju keberlanjutan mengarah pada perdebatan tentang bentuk tata kelola apa yang terbaik dan bagaimana menerapkannya (Koop & van Leeuwen, 2017). Teori dan praktik perkotaan di era pasca industri semakin sering mengarah pada pendekatan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan (Badach & Dymnicka, 2017). Untuk membuat kota berkelanjutan, kota harus mengembangkan konsep dan praktik adaptif yang mengatasi tantangan perkotaan, perubahan cepat, dan kompleks. Dibutuhkan konsep tata kelola yang dapat menangani tantangan pembangunan dan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selama beberapa tahun terakhir, tata kelola perkotaan yang baik (*good urban governance*) adalah salah satu pendekatan baru dalam pengelolaan

perkotaan. *Good urban governance* menekankan fakta bahwa warga negara tidak boleh kehilangan akses ke hal-hal penting perkotaan seperti tempat tinggal yang memadai, keamanan kerja, kesehatan, dan pemanfaatan lingkungan yang baik (Seyedalhosseini, 2016). PBB mempromosikan tata kelola perkotaan sebagai jalan yang layak untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat perkotaan dengan mengadvokasi kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah kota, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah (LSM), sektor swasta, serta lembaga regional dan internasional (Meyer & Auriacombe, 2019). Pendekatan tata kelola kota yang baik ini dianggap sebagai metode manajemen yang paling efisien, terjangkau, dan berkelanjutan (Poorahmad, 2018).

Terdapat hubungan erat antara tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan, yang begitu penting di berbagai tingkat nasional dan daerah (Go et al., 2013). Pencapaian kota dengan kualitas hidup yang tinggi di mana fasilitas dan kebutuhan warganya terpenuhi tergantung pada realisasi model tata kelola perkotaan yang baik. Oleh karena itu, tata kelola yang baik merupakan model pemanfaatan sumber daya dan wewenang secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan, pembangunan yang menjamin terwujudnya keadilan, ketertiban, keamanan dan kesehatan individu dan masyarakat, serta perlindungan yang optimal terhadap sumber-sumber sumber daya hayati, serta kemakmuran, pertumbuhan bakat, dan kemampuan masyarakat, serta kemampuan lingkungan (Mohammadpour & Mozdabadi, 2017).

Meskipun pendekatan ini tidak sepenuhnya baru, namun tetap valid dan terbuka untuk tantangan baru dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia di lingkungan perkotaan (Badach & Dymnicka, 2017). Konsep tata kelola kota yang baik dikembangkan dalam perdebatan akademis maupun dalam praktik kebijakan yang dipromosikan oleh pemerintah daerah dan organisasi internasional di banyak negara. Beberapa akademisi menggarisbawahi bahwa meskipun konsep ini diteorikan secara mendalam dalam kumpulan literatur yang luas, hanya sedikit penelitian yang telah dilakukan untuk menyelidiki hasilnya. Terlepas dari kesadaran pentingnya dinamika tata kelola perkotaan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, perannya belum sepenuhnya dieksplorasi dalam penelitian (Cashmore & Richardson, 2013). Dalam merancang kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan,

pentingnya dimensi tata kelola seringkali diremehkan atau diabaikan sama sekali (McNeill et al., 2014). Dimensi tata kelola dari transisi masyarakat ke keberlanjutan belum dibahas secara memadai dalam literatur (Patterson et al., 2017).

Peningkatan jumlah penelitian akan memungkinkan untuk menilai kembali standar normatif dan menyelidiki potensi yang diciptakan oleh konseptualisasi dari pendekatan *good urban governance*. Penting untuk mengamati apakah indikator tata kelola kota yang baik yang dapat menjadi faktor penting dalam penerapannya secara penuh. Laju dan besarnya perubahan yang cepat di Singapura menjadikannya studi kasus yang patut dicontoh untuk perubahan yang didorong oleh urbanisasi dalam pengelolaan di dalamnya (Friess, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka umum *good urban governance* dan memeriksa contoh pengalaman yang dilakukan oleh Singapura melalui pendekatan tata kelola kotanya sehingga dapat memberikan wawasan, baik secara konseptual maupun empiris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkonstruksi pemikiran dan

membangun kerangka dari fenomena dan permasalahan yang dihadapi. Pengumpulan data dengan cara kajian literatur dengan mengumpulkan dan meringkas literatur (buku, jurnal, dan publikasi media) yang sesuai dengan topik penulisan. *Literatur review* merupakan suatu metode pengumpulan data dan analisis data dan/atau informasi yang relevan dari penelitian sebelumnya sehingga hasilnya akan relevan dan bermanfaat bagi peneliti untuk melakukan studi analisis (Snyder, 2019). Penelitian ini terdiri dari telaah literatur tata kelola kota, khususnya publikasi yang erat kaitannya dengan isu urbanisasi dan pembangunan berkelanjutan. Pemilihan teknik pengumpulan data mempertimbangkan efektivitas waktu, aksesibilitas data, dan reliabilitas data.

Tahapan dalam pemilihan artikel adalah:

1. Pencarian secara *online* dilakukan pada database elektronik yang bersumber dari Scopus, Oxford Academic, ProQuest, Sage, JSTOR dan sumber lainnya yang relevan untuk menemukan artikel yang judulnya mengandung kata 'good urban governance'. Artikel yang teridentifikasi basis data sebanyak 3.712;
2. Dari hasil tahap pertama, pencarian dibatasi hanya pada disiplin ilmu

ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan mencari kata yang relevan, yaitu 'urban', 'urbanization', 'sustainability', dan 'sustainable development', artikel yang open-access dan peer-reviewed, ditulis dalam Bahasa Inggris, dan dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir. Pencarian menghasilkan sekitar 323 artikel;

3. Pada tahapan terakhir, pemilihan dibatasi pada artikel dengan melihat relevansi isi berdasarkan judul, abstrak, dan tujuan penelitian. Akhirnya, 15 artikel dipilih digunakan dalam melakukan kajian pustaka ini.

Selanjutnya, data dianalisis melalui tiga prosedur utama, yaitu mereduksi data untuk dilakukan seleksi sehingga data relevan untuk disajikan, menyajikan data dan informasi, dan menarik kesimpulan (Creswell & Poth, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakpastian, perubahan yang cepat, dan kompleksitas wilayah perkotaan memerlukan konsep tata kelola yang dapat menjawab tantangan pembangunan perkotaan dan memastikan terwujudnya pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Pembangunan kota yang menggunakan pendekatan tradisonal

dianggap tidak mampu membangun kota yang adaptif (Ni'mah et al., 2021). Dahulu, pengelolaan kota tidak memiliki dimensi yang kompleks dan multidimensi sehingga pengelolaan kota lebih mudah dibandingkan saat ini. Dengan meningkatnya jumlah orang yang tinggal di kota, tata kelola kota menjadi lebih sulit karena munculnya masalah baru dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan kota.

Konsep pembangunan berkelanjutan memainkan peran yang semakin penting dalam model baru perubahan perkotaan global yang bertujuan mengintegrasikan kebutuhan masyarakat modern dan kepedulian terhadap generasi mendatang. Pentingnya menyeimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang melalui pembangunan berkelanjutan telah membawa perubahan dalam pendekatan pengelolaan perkotaan. Perubahan pendekatan ini telah mengarah pada pengenalan konsep seperti tata kelola kota yang baik, yang telah diusulkan sebagai cara yang paling efisien dan efektif untuk mengelola kota modern (Healey, 2015).

Tata kelola digunakan untuk menunjukkan pergeseran praktik kekuasaan dari 'pemerintah' (*government*) menjadi 'pemerintahan' (*governance*) dan bergeser lebih lanjut

kepada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Hendriks, 2014). Pendekatan pertama dipahami sebagai kemudi vertikal, monosentris, dan unilateral, dan yang kedua dipahami sebagai horizontal, plurisentris, dan multilateral. Dewasa ini, perubahan dari pemerintah ke pemerintahan tidak hanya sekedar perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup perubahan gaya, ekspresi, dan wacana kenegaraan (Aina et al., 2019). Tidak ada lagi prasangka bahwa pemerintah menjadi aktor tunggal penyelenggaraan pemerintahan dan tidak ada kepastian tentang tanggung jawab pemerintah dan sektor lainnya. Peran pemerintah bukan sebagai penyedia barang publik, melainkan peran sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat lokal mengelola urusan mereka sendiri. Dalam perspektif tata kelola, yang melampaui sektor publik dan swasta serta masyarakat sipil, fokusnya harus pada jaringan daripada hubungan hierarkis, yang diperkuat oleh diversifikasi sumber daya, aktor, serta pengetahuan dan pengalaman mereka (Keping, 2018).

PBB mendefinisikan tata kelola kota yang baik (*good urban governance*) sebagai proses berkelanjutan yang dicapai melalui kepentingan pemangku kepentingan yang saling bertentangan dan berbeda dalam kerangka lembaga

formal dan modal sosial warga negara (Ayoubi et al., 2021) karena tata kelola perkotaan, beberapa dan bahkan kelompok yang berbeda secara bersama-sama terlibat dalam fungsi dan sifat pengelolaan perkotaan. *Good urban governance* ialah proses memadukan kepentingan publik dan pribadi yang ditandai dalam konteks kelembagaan, di mana para aktor dalam kelembagaan tersebut saling berhubungan dan keterkaitan (Van den Dool et al., 2015). Dapat diartikan lain sebagai proses berkelanjutan di mana kepentingan yang bertentangan atau beragam dapat diakomodasi dan tindakan kooperatif dapat dilakukan (Perry et al., 2014).

Good urban governance dikembangkan melalui pendekatan multidimensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat perkotaan, termasuk partisipasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, manajemen dan administrasi kota, serta transparansi dan akuntabilitas publik (Meyer & Auriacombe, 2019). Pendekatan ini dampak dari upaya dari semua aktor perkotaan pada pengelolaan kota untuk memenuhi layanan publik, kebutuhan umum warga, dan untuk menyeimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Konsep ini diadvokasi sebagai strategi untuk meningkatkan

kualitas hidup di permukiman perkotaan baik di negara maju maupun negara berkembang di mana pertumbuhan berkelanjutan dan kebijakan perkotaan yang inklusif terancam oleh urbanisasi yang cepat.

Memenuhi tantangan tata kelola perkotaan membutuhkan proses dan

kapasitas yang dapat menghasilkan pendekatan pembangunan kota yang berkelanjutan. Berikut hasil kajian literatur dari artikel dalam berbagai konteks *good urban governance* yang dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Kajian Literatur Artikel *Good Urban Governance*

No	Judul / Penulis	Metode	Lokus Penelitian	Temuan Kunci
1.	<i>Understanding Good Urban Governance: Essentials, Shifts, and Values</i> (Hendriks, 2014)	Kualitatif - deskriptif	Belanda, Eropa	Nilai-nilai inti dari tata kelola kota yang baik: daya tanggap, efektivitas, keadilan prosedural, ketahanan, dan keseimbangan.
2.	<i>Strengthening Good Governance in Urban Land Management in Ethiopia A Case-study of Hawassa</i> (Sungena et al., 2014)	Kuantitatif – deskriptif	Hawasa, Ethiopia, Afrika	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa responden dari kawasan permukiman formal dan informal memiliki pandangan yang sama mengenai sebagian besar prinsip tata kelola yang baik (partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas) dan terbukti kuat hubungan antara prinsip-prinsip tata kelola dan proses penyerahan lahan.
3.	<i>The Role Of Urban Governance In The Rapid Development Of Singapore, 1959-Present*</i> (Toh, 2015)	Kualitatif - deskriptif	Singapura, Asia	Peran tata kelola kota dalam mengelola transformasi Singapura didasarkan pada prinsip memimpin dengan visi dan pragmatisme, membangun budaya integritas, budayakan lembaga yang bersuara, bekerja dengan pasar, melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

4.	<i>Application of the "Urban Governance Index" to water service provisions: Between rhetoric and reality</i> (Moretto, 2015)	Mixed methods	Venezuela, Amerika Selatan	Mengadaptasi Indeks Tata Kelola Perkotaan UN-Habitat (efektivitas, ekuitas, partisipasi, dan akutabilitas) ke dalam dua dimensi tata kelola untuk meningkatkan akses ke layanan dasar, yaitu layanan air di Venezuela.
5.	<i>Evaluating the Performance of Municipality in Terms of Good Urban Governance (Case Study: District 1 and 3 of Zahedan City)</i> (Seyedalhosseini, 2016)	Kuantitatif – deskriptif	Zahedan, Iran, Asia	Penilaian <i>good urban governance</i> dengan indikator transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, efektivitas di Kota Zahedan menghasilkan aspek efektivitas dengan kondisi paling optimal dan aspek partisipasi menjadi yang paling buruk. Warga Zahedan memiliki kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal partisipasi dalam pengelolaan perkotaan.
6.	<i>Concept of 'Good Urban Governance' and Its Application in Sustainable Urban Planning</i> (Badach & Dymnicka, 2017)	Kualitatif	Polandia, Eropa	Terlepas dari praktik konsultasi publik, indikator <i>good urban governance</i> (seperti inklusivitas, kewarganegaraan, akuntabilitas, dan efektivitas) di Polandia tidak sepenuhnya terpenuhi. Gerakan perkotaan yang muncul dapat menjadi inti dari transformasi tata kelola dan berkontribusi pada pengembangan keterlibatan dan kesadaran masyarakat, menarik perhatian publik ke banyak isu penting.
7.	<i>A study of implementation of good urban governance: A case study of Qaraghaj</i>	Kuantitatif – deskriptif	Qaraghaj, Iran, Asia	Penilaian kriteria <i>good urban governance</i> (daya tanggap dan tanggung jawab, transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi dan efektivitas, taat hukum) di

	city (Ghorbani & Tahooni, 2018)			Kota Qaraghaj lebih rendah daripada nilai yang diasumsikan. Warga menilai pemerintahan kota yang sedang berjalan jauh daripada yang diinginkan.
8.	<i>Good Urban Governance in Urban Neighborhoods</i> (Case: Marivan City) (Poorahmad, 2018)	Kuantitatif - deskriptif	Marivan, Iran, Asia	Indikator <i>good urban governance</i> (partisipasi warga, efektivitas dan efisiensi, reseptif dan responsif, tanggung jawab, transparansi, keabsahan, orientasi yang disepakati, keadilan, wawasan strategis, desentralisasi) di Kota Marivian dalam kondisi jauh dari yang diinginkan. Masih terdapat model tradisional dan pengelolaan yang tidak partisipatif. Hambatan pendekatan ini karena struktur pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan dan perencanaan terpusat yang tidak memungkinkan warga dan pemangku kepentingan lain untuk terlibat dalam administrasi urusan perkotaan.
9.	<i>A good-governance framework for urban management</i> (Biswas et al., 2019)	Kuantitatif - deskriptif	Mumbai, India, Aisa	Hasil analisis komparatif di antara 22 kerangka tata kelola yang ada di seluruh dunia dengan memilih 13 kriteria utama dan 74 sub-kriteria: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, kesetaraan, keberlanjutan, visi & perencanaan, legitimasi & birokrasi, kapasitas sipil, penyampaian layanan, ekonomi yang efisien, hubungan dan keamanan. Penilaian <i>good urban</i>

				<i>governance</i> di Mumbai dengan menggunakan indikator langsung yang representatif dari sub-kriteria.
10.	<i>Towards good governance of urban greening: insights from four initiatives in Melbourne, Australia</i> (Coffey et al., 2020)	Kualitatif - deskriptif	Melbourne, Australia	Tata kelola penghijauan kota yang baik di Melbourne menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut menyediakan serangkaian kriteria yang koheren untuk mengeksplorasi dinamikanya, yaitu legitimasi, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, keadilan, integrasi, kemampuan, kemampuan beradaptasi.
11.	<i>Good Urban Governance and City Resilience: An Afrocentric Approach to Sustainable Development</i> (Meyer & Auriacombe, 2019)	Kualitatif - deskriptif	Afrika	Gagasan tata kelola kota yang baik merupakan prasyarat bagi negara-negara Afrika untuk merancang dan melaksanakan inisiatif pembangunan berkelanjutan dengan sukses. Prinsip <i>good urban governance</i> terdiri partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan, manajemen kota dan administrasi kota yang efektif, dan transparansi dan akuntabilitas.
12.	<i>Top-down sustainable urban development? Urban governance transformation in Saudi Arabia</i> (Aina et al., 2019)	Kualitatif - deskriptif	Arab Saudi, Asia	Dalam kasus Arab Saudi, telah terjadi perubahan positif yang mencolok dalam tata kelola perkotaan untuk pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, strategi proaktif, adaptif, dan kolaboratif (tata kelola bertingkat), kriteria berbasis keberlanjutan untuk

				perencanaan, akuntabilitas dan transparansi, kerangka kerja legislatif, serta teknologi dan keterbukaan terhadap kreativitas dan inovasi.
13.	<i>Institutional barriers to achieving good urban governance as a social determinant of health</i> (Ayoubi et al., 2021)	Kuantitatif - deskriptif	Isfahan, Iran, Asia	Tata kelola kesehatan kota di Isfahan dinilai berdasarkan partisipasi, berorientasi keadilan, berdasarkan konsesus, efesinsi dan efektivitas, legalitas, transparansi, akuntabilitas, penerimaan konsus. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan fisik/spasial, hambatan fragmentasi sosial, dan penghalang fungsional.
14.	<i>Urban Sustainability and Resilience Governance: Review from the Perspective of Climate Change Adaptation And Disaster Risk Reduction</i> (Ni'mah et al., 2021)	Kualitatif - deskriptif	Indonesia, Asia	Gambaran umum pendekatan tata kelola diurai menjadi pendekatan adaptif dan antisipatif. Tata kelola yang adaptif mensyaratkan prinsip fleksibilitas yang diterapkan dalam siklus manajemen dalam perumusan kebijakan, sedangkan tata kelola antisipatif mensyaratkan prinsip proaktif dengan penerapan pandangan ke depan dalam perumusan kebijakan. Beberapa tantangan dalam membangun <i>good governance</i> berdasarkan pendekatan adaptif adalah mendorong keterlibatan masyarakat, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, dan membangun integrasi antar aktor, jaringan, dan kolaborasi.
15.	<i>Impacts of Governance toward Sustainable</i>	Kualitatif - deskriptif	Uyo, Nigeria, Afrika	Penyebab utama pembangunan kota di Uyo yang tidak terencana dengan baik adalah:

<p><i>Urbanization in a Midsized City: A Case Study of Uyo, Nigeria</i></p> <p>(Essien, 2021)</p>		<p>friksi antara administrasi pemerintahan yang berurutan, kurangnya dana yang dialokasikan untuk keamanan perumahan dan pemeliharaan banyak infrastruktur yang ada, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan pendapatan dan pelaksanaan proyek di dalam kota.</p>
---	--	--

Sumber: diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan terdapat 15 rujukan artikel yang membahas mengenai *good urban governance*. Seluruh artikel ini memiliki perbedaan lokus penelitian, metode penelitian, kriteria yang digunakan dalam penelitian, dan hasil yang diharapkan. Pada lokus penelitian terdapat variasi dalam lingkup negara antar benua.

Tabel 2. Pemetaan Lokus Penelitian

Lokus Penelitian	Penelitian
Eropa	1, 6
Asia	3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14
Australia	9
Afrika	2, 11, 15
Amerika Selatan	4

Sumber: diolah peneliti, 2023

Mayoritas artikel penelitian dikerjakan di benua Asia dengan jumlah delapan artikel, kemudian disusul Afrika tiga artikel, dan Eropa dua artikel. Hal ini menunjukkan masih minimnya

penelitian dengan topik *good urban governance* di benua lain, seperti Australia dan Amerika Selatan.

Pada aspek metode penelitian yang digunakan, terlihat pada penggunaan metode campuran (*mixed methods*) masih sangat sedikit, hanya satu artikel yang ditemukan, sedangkan penelitian lain kebanyakan menggunakan satu macam metode saja. Masing-masing ditemukan delapan artikel untuk metode kualitatif dan enam artikel untuk metode kuantitatif.

Tabel 3. Pemetaan Metode Penelitian

Lokus Penelitian	Penelitian
Kualitatif	1, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15
Kuantitatif	2, 5, 7, 8, 9, 13,
Mixed Methods	4

Sumber: diolah peneliti, 2023

Berdasarkan kajian literatur yang ada, banyak kriteria yang berbeda telah diusulkan untuk mengukur kualitas tata

kelola kota. Melihat banyaknya indikator tata kelola kota yang ada, ketika mengukur dan menilai tata kelola menemui kekurangan konsensus yang kritis. UNDP menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan tentang satu alat atau instrumen untuk menilai tata kelola

(Moretto, 2015). Tetapi, tampaknya ada konsensus yang dapat dilihat berdasarkan frekuensi kriteria terbanyak yang digunakan dalam penelitian, yaitu: transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, efektifitas dan efisiensi, dan berwawasan strategis.

Tabel 4. Kriteria *Good Urban Governance* dalam Penelitian

Kriteria	Jumlah	Kriteria	Jumlah
Transparansi dan Akuntabilitas	13	Tanggung Jawab	2
Partisipasi	11	Kepatuhan Hukum	2
Efektifitas dan Efisiensi	9	Inklusivitas	2
Berwawasan Strategis	5	Keberlanjutan	2
Keadilan	4	Kewarganegaraan	1
Daya Tanggap / Responsif	4	Ketahanan	1
Keabsahan	4	Integrasi Kemampuan	1
Orientasi Konsensus	3	Kemampuan Beradaptasi	1
Desentralisasi	3	Keseimbangan	1
Kesetaraan	3		

Sumber: diolah peneliti, 2023

Empat prinsip *good urban governance* yang terbanyak ditemukan dalam kajian literatur didefinisikan seperti berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak pihak yang berkepentingan dan pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik, serta pemangku kepentingan kelembagaan;
2. Partisipasi, yaitu publik yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas;
3. Efektifitas dan efisiensi, yaitu proses dan institusi menghasilkan hasil

yang memenuhi kebutuhan sambil memanfaatkan sebaik-baiknya;

4. Berwawasan strategis, yaitu semua kegiatan di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi implementasi yang tepat sasaran, manfaat dan berkesinambungan.

Hasil penelitian dalam kajian literatur sebagian besar artikel lebih banyak fokusnya dalam hal implementasi *good urban governance* pada studi kasus yang ada dengan hasil di bawah rata-rata atau yang diinginkan. Hanya terdapat dua artikel yang membahas *best practice* dalam melaksanakan tata kelola perkotaannya, yaitu kasus di Singapura dan Venezuela. Penelitian dengan topik *good urban governance* yang secara khusus menyoroti praktik terbaik dalam tata kelola kota masih sangat terbatas, mayoritas membahas masalah dan penerapan *good urban governance*-nya. Dengan kata lain, penelitian yang menunjukkan keberhasilan pengelolaan tata kota dengan menerapkan *good urban governance* masih minim dilakukan. Tata kelola kota yang baik juga menggambarkan pendekatan dan penerapan yang unik, antara negara maju dan berkembang. Diperlukan lebih banyak lagi penelitian yang

mengambarkan praktik keberhasilan tata kelola kota dengan pendekatan *good urban governance*. Tata kelola kota yang baik akan menjadi cara yang paling efektif, paling murah dan paling berkelanjutan untuk mengelola sistem perkotaan yang kompleks (Poorahmad, 2018).

Singapura hanya membutuhkan waktu empat puluh tahun sejak kemerdekaannya untuk membuat lompatan signifikan dari negara terbelakang dan berkembang menjadi salah satu kota paling layak huni di dunia dengan kenaikan tingkat populasi sebanyak tiga kali lipat sebesar 5,4 juta orang saat ini (CLC, 2016). Periode pembangunan perkotaan ini telah menyaksikan perubahan ekonomi yang substansial, dengan pergeseran dari pertanian berbasis perkebunan menjadi manufaktur sekitar tahun 1965, dan fokus pada jasa keuangan di akhir abad ke-20 (Tan et al., 2021). Singapura adalah negara kepulauan kecil dengan tingkat urbanisasi tinggi dengan sumber daya terbatas, negara ini konsisten dalam menghasilkan solusi ramah lingkungan dan telah memperkenalkan beragam inisiatif berkelanjutan untuk menjadi lebih mandiri, untuk melayani populasinya yang terus bertambah secara efisien dan untuk berubah menjadi 'City in Garden'.

Dalam survei kota layak huni yang dilakukan oleh Survei Kualitas Hidup Mercer, Singapura telah dinilai sebagai salah satu dari sedikit kota dengan kepadatan tinggi yang mampu mencapai standar kelayakan huni yang tinggi. Dengan pendekatan pembangunan yang seimbang, tata kelola dan perencanaan terpadu jangka panjang, Singapura menawarkan referensi dan model pembangunan yang berharga bagi negara-negara yang berupaya menciptakan kota yang layak huni di bawah kondisi kehidupan dengan kepadatan tinggi. Transformasi Singapura dirangkum dalam Kerangka Kerja Kelayakan Hidup *Center for Liveable Cities* (CLC) yang berfokus pada tiga hasil penting: ekonomi yang kompetitif, lingkungan yang berkelanjutan, dan kualitas hidup yang tinggi. Salah satu sistem utama yang mendasari keberhasilan perkotaan Singapura adalah tata kelola kota untuk mempertahankan kondisi kota yang layak huni.

Salah satu contoh tata kelola kota yang baik adalah Kota Punggol (CLC, 2016). Dulunya merupakan desa nelayan dengan banyak peternakan babi dan unggas, terletak di bagian timur laut Singapura, dengan luas total 9,57 km² dan 155 ha tanah yang direklamasi dari laut. Pada tahun 1996, Pemerintah akan mengembangkan Punggol menjadi

kota model abad ke-21, yang dikenal sebagai “Punggol 21”. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan kota, seperti pembangunan jangka panjang dengan pemangku kepentingan bersatu dan bekerja bahu membahu dalam mempersiapkan dan melaksanakan yang sekarang disebut dengan “Venesia Singapura”. Kedua, membangun beberapa fleksibilitas dengan visi awal “Punggol 21” dikonseptualisasikan pada 1990-an. Namun implementasi rencana tersebut tertunda selama beberapa tahun karena krisis keuangan Asia. Setelah itu, rencana tersebut ditinjau kembali, diperbaiki dan ditingkatkan menjadi “Punggol 21-Plus” dengan fitur utama adalah Punggol *Waterway*. Ketiga, memimpin dengan pragmatisme, yaitu keterbatasan sumber daya lahan terus memaksa Singapura untuk mengadopsi pendekatan pragmatis dalam pembangunan.

Visi mengubah Punggol menjadi kota tepi laut tidak tercipta secara kebetulan. Pada awal 1990-an, ketika Tempat Pembuangan Lim Chu Kang habis dan Tempat Pembuangan Sampah Lorong Halus diproyeksikan akan habis pada tahun 2000, Punggol awalnya diidentifikasi sebagai TPA berikutnya yang melayani Singapura. Namun, Pemerintah kemudian menyadari bahwa Punggol dapat digunakan

sebagai perumahan baru, mengingat permintaan perumahan di Singapura terus meningkat. Keempat, melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan Punggol dengan mengerjakan proyek bersama dengan penduduk Punggol untuk bersama-sama menciptakan "Proyek Cinta Punggol", ini bertujuan untuk mengembangkan ide-ide baru yang akan memungkinkan kepemilikan komunitas yang lebih kuat oleh warga Punggol di komunitas dan lingkungan mereka. Kelima, bekerja dengan pemangku kepentingan, yaitu mayoritas stok perumahan di Punggol adalah perumahan umum. Namun, sektor swasta juga memainkan peran kunci dalam mengembangkan Punggol. Pengembang swasta diundang untuk mengembangkan perumahan pribadi dan kondominium eksekutif melalui penjualan tanah yang menyediakan kombinasi perumahan yang lebih baik di Punggol. Keenam, dalam membangun Kota Punggol ini, pemerintah menanamkan rasa akuntabilitas pada pejabat publik dengan memastikan bahwa mekanisme pembiayaan yang sehat diterapkan untuk menjaga solvabilitas fiskal dan kesinambungan proyek.

Berdasarkan contoh kasus di atas terkait pendekatan Singapura terhadap

tata kelola perkotaan di Kota Punggol, beberapa di antaranya menonjol sebagai prinsip utama, seperti perencanaan pembangunan jangka panjang, membangun beberapa fleksibilitas, memimpin dengan pragmatis, melibatkan masyarakat, dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain (Toh, 2015). Pendekatan yang dilakukan Singapura didukung oleh prinsip-prinsip utama yang tidak jauh dari hasil kajian literatur terkait konsensus kriteria *good urban governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, efektifitas dan efisiensi, dan berwawasan strategis.

Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa ketika prinsip-prinsip *good urban governance* dipraktikkan untuk memandu pembangunan kota mampu mengatasi tantangan kompleks yang menyertai urbanisasi. Singapura, dengan 7.028 penduduk per km² telah berhasil memadukan kelayakan huni yang tinggi dengan kepadatan yang tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh pendekatan pembangunan yang sangat intensif yang diadopsi Singapura. Dengan pendekatan tata kelola kota yang baik membuat Singapura mencapai kota yang dianggap sangat layak huni dan memiliki pembangunan berkelanjutan

Tabel 5. Perbandingan Hasil Kajian Literatur dan Tata Kelola Kota Singapura

Kriteria Hasil Kajian Literatur	Tata Kelola Kota di Singapura
Transparansi dan Akuntabilitas	Sejak kemerdekaan Singapura, budaya integritas telah ditegakkan oleh sistem tata kelola yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan tidak korup. Budaya integritas ini telah memengaruhi cara pejabat publik Singapura, serta politisi, menjalankan tanggung jawab mereka, yang membuat mereka mendapatkan kredibilitas dan legitimasi tingkat tinggi yang dipatuhi semua masyarakatnya.
Partisipasi	Melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan: menciptakan kota yang layak huni adalah pekerjaan yang besar dan kompleks, dan perencana kota membutuhkan dukungan dari penduduk kota agar proyek dan kebijakan berhasil dan berkelanjutan. Menciptakan kepentingan di kota untuk masyarakat memberikan kesempatan bagi publik (masyarakat) untuk bekerja sama demi kebaikan kota dalam jangka panjang.
Efektifitas dan Efisiensi	<p>a. Memimpin dengan pragmatis: kepemimpinan dengan visi dilaksanakan baik di tingkat politik dan birokrasi pada tahap perencanaan dan implementasi kebijakan. Kemauan politik untuk mendorong melalui kebijakan atau proyek yang dianggap tidak populer atau sulit secara politik pada saat itu, tetapi untuk keuntungan jangka panjang negara dan rakyatnya.</p> <p>b. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain: memanfaatkan kekuatan pasar untuk meningkatkan efisiensi. Sektor swasta telah berperan dalam penyediaan layanan yang tidak dapat disediakan sendiri oleh pemerintah, atau layanan yang ingin dilepaskan oleh pemerintah melalui privatisasi untuk mengarahkan kembali dana publik ke berbagai prioritas</p>
Berwawasan Strategis	<p>a. Perencanaan pembangunan jangka panjang: membantu pejabat menjaga keseimbangan, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan dan membantu pemerintah mengidentifikasi masalah di masa depan, membuatnya bijaksana untuk mulai mengambil langkah lebih awal untuk mencegah masalah, atau untuk mengembangkan proyek yang baik sebelumnya.</p> <p>b. Membangun beberapa fleksibilitas: pemerintah terbuka untuk mengubah jadwal atau bentuk pembangunan tertentu yang tercantum dalam Rencana Induk karena kondisi tertentu.</p>

Sumber: diolah peneliti, 2023

Meskipun berpenduduk padat, Singapura telah mempertahankan kelayakan huni yang tinggi melalui perencanaan perkotaan yang ilmiah dan tata kelola perkotaan yang menyeluruh, memberikan pengalaman berharga bagi

pembangunan perkotaan negara-negara lain (Dell'Anna et al., 2022). Skala geografis dan struktur pemerintahannya memungkinkan efisiensi dalam pembentukan dan implementasi kebijakan, dan negara ini telah mampu mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, ukuran dan kurangnya sumber daya Singapura membuatnya selalu rentan terhadap perubahan lingkungan politik dan ekonomi eksternal. Pola yang dialami oleh Singapura cenderung mewakili perubahan yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir di kota-kota lain yang berkembang pesat, dan mungkin terjadi di kota-kota tetangga di Asia Tenggara di masa depan. Tata kelola kota yang baik menciptakan kondisi yang tepat bagi sebuah kota untuk mencapai hasil kota yang berkelanjutan.

Dimensi tata kelola yang baik ini saling terkait erat dan saling memperkuat dan menawarkan titik masuk yang berbeda ke dalam penilaian tata pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip ini secara luas dipahami sebagai komponen kunci dari kerangka kerja pembangunan berkelanjutan (Aina et al., 2019). Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik jelas merupakan hal mendasar untuk transformasi dan reformasi bidang di sektor publik.

KESIMPULAN

Urbanisasi menghadirkan peluang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, namun juga dapat menjadi hambatan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Mempertimbangkan bahwa pertumbuhan dalam konteks urbanisasi harus diarahkan untuk memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pembangunan kota berkelanjutan dapat dicapai melalui tata kelola kota yang baik (*good urban governance*) dengan pendekatan partisipatif, *multi-stakeholder* dan kolaboratif untuk pembuatan kebijakan dan implementasi dianjurkan sebagai persyaratan utama untuk mencapai keberlanjutan yang ideal. Tujuan terpenting dari pengelolaan perkotaan adalah meningkatkan kondisi hidup penduduk dalam bentuk kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda, melindungi hak-hak sipil, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, dan melindungi lingkungan fisik.

Tata kelola dan keberlanjutan keduanya saling terkait karena tata kelola kota yang baik dianggap sebagai prasyarat untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan (Meyer

& Auriacombe, 2019). Tata kelola yang baik dianggap sebagai persyaratan untuk mengurangi permasalahan kota dan mewujudkan kota yang efisien, efektif, dan beragam (Verrest et al., 2013). Mengidentifikasi kriteria untuk mendukung tata kelola perkotaan merupakan tantangan utama dalam pembangunan kota berkelanjutan. Kriteria penting setidaknya menyangkut transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, efektifitas dan efisiensi, dan wawasan strategis. Pengalaman Singapura memberikan gambaran bagaimana pemerintah mengelola kota dan menghadapi masalah dan tantangan urbanisasi. Berbagai pelajaran dapat diambil dari praktik-praktik baik tersebut, yang dapat ditiru oleh pemerintah daerah lain di wilayah yang menghadapi tantangan urbanisasi yang cepat.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat sejumlah rekomendasi penelitian lanjutan yang dapat dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai konsep dan praktik *good urban governance* dalam mendukung pengembangan kota berkelanjutan:

1. Mengeksplorasi ragam konsepsi dan praktik *good urban governance* berdasarkan ideologi politik negara, sistem pemerintahan, budaya, dan nilai yang berlaku di berbagai negara.

2. Memperbanyak penelitian terkait praktik *good urban governance* di negara-negara berkembang, khususnya benua Asia dan Afrika yang mengalami tingkat urbanisasi tinggi dengan metode penelitian *mixed methods* agar menjadi bahan evaluasi secara komprehensif terkait pengelolaan kota yang dilakukan.

Memperbanyak penelitian praktik keberhasilan pendekatan *good urban governance*, baik di negara maju dan berkembang agar dapat menjadi acuan pembelajaran untuk negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina, Y. A., Wafer, A., Ahmed, F., & Alshuwaikhat, H. M. (2019). Top-down sustainable urban development? Urban governance transformation in Saudi Arabia. *Cities*, 90, 272–281.
- Akinluyi, M. L., & Adedokun, A. (2014). Urbanization, Environment and Homelessness in the Developing world: The Sustainable Housing Development. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(2), 261.
- Ayele, A., & Tarekegn, K. (2020). The impact of urbanization expansion on agricultural land in Ethiopia: A review. *Environmental & Socio-Economic Studies*, 8(4), 73–80.
- Ayoubi, N. H., Fatehi, R. N., Salajegheh, S., & Kamali, M. J. (2021).

- Institutional barriers to achieving good urban governance as a social determinant of health.*
- Badach, J., & Dymnicka, M. (2017). Concept of 'Good Urban Governance' and Its Application in Sustainable Urban Planning. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 245(8), 082017.
- Biswas, R., Jana, A., Arya, K., & Ramamritham, K. (2019). A good-governance framework for urban management. *Journal of Urban Management*, 8(2), 225–236.
- Brillantes Jr, A. B., & Flores, H. P. (2012). Decentralization and good urban governance in Southeast Asia. *Urbanization in Southeast Asia: Issues & Impacts*, 293–319.
- Cashmore, M., & Richardson, T. (2013). Power and environmental assessment: Introduction to the special issue. *Environmental Impact Assessment Review*, 39, 1–4.
- Cobbinah, P. B., Erdiaw-Kwasie, M. O., & Amoateng, P. (2015). Rethinking sustainable development within the framework of poverty and urbanisation in developing countries. *Environmental Development*, 13, 18–32.
- Coffey, B., Bush, J., Mumaw, L., De Kleyn, L., Furlong, C., & Cretney, R. (2020). Towards good governance of urban greening: insights from four initiatives in Melbourne, Australia. *Australian Geographer*, 51(2), 189–204.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dell'Anna, F., Bravi, M., & Bottero, M. (2022). Urban Green infrastructures: How much did they affect property prices in Singapore? *Urban Forestry & Urban Greening*, 68, 127475.
- Essien, E. (2021). Impacts of governance toward sustainable urbanization in a mid-sized city: A case study of Uyo, Nigeria. *Land*, 11(1), 37.
- Friess, D. A. (2017). Singapore as a long-term case study for tropical urban ecosystem services. *Urban Ecosystems*, 20(2), 277–291.
- Ghorbani, R., & Tahooni, M. (2018). A study of implementation of good urban governance: A case study of Qaraghaj city. *Journal of Geography and Spatial Development*, 1(2), 97–115.
- Go, F. M., Trunfio, M., & Lucia, M. Della. (2013). Social capital and governance for sustainable rural development. *Studies in Agricultural Economics*, 115(1316-2016–102794), 104–110.

- Healey, P. (2015). Planning theory: the good city and its governance. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 18, 202–207.
- Hendriks, F. (2014). Understanding good urban governance: Essentials, shifts, and values. *Urban Affairs Review*, 50(4), 553–576.
- Keping, Y. (2018). Governance and good governance: A new framework for political analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11, 1–8.
- Koop, S. H. A., & van Leeuwen, C. J. (2017). The challenges of water, waste and climate change in cities. *Environment, Development and Sustainability*, 19(2), 385–418.
- McNeill, D., Bursztyn, M., Novira, N., Purushothaman, S., Verburg, R., & Rodrigues-Filho, S. (2014). Taking account of governance: The challenge for land-use planning models. *Land Use Policy*, 37, 6–13.
- Meyer, N., & Auriacombe, C. (2019). Good urban governance and city resilience: An afrocentric approach to sustainable development. *Sustainability*, 11(19), 5514.
- Mohamed, A., Worku, H., & Lika, T. (2020). Urban and regional planning approaches for sustainable governance: The case of Addis Ababa and the surrounding area changing landscape. *City and Environment Interactions*, 8, 100050.
- Mohammadpour Zarandi, H., & Mozdabadi, S. M. T. (2017). Good urban governance: a new approach to economy and urban management. *Tehran: Tahan Publications*.
- Moretto, L. (2015). Application of the “Urban Governance Index” to water service provisions: Between rhetoric and reality. *Habitat International*, 49, 435–444.
- Ni’mah, N. M., Wibisono, B. H., & Roychansyah, M. S. (2021). Urban sustainability and resilience governance: review from the perspective of climate change adaptation and disaster risk reduction. *Journal of Regional and City Planning*, 32(1), 83–98.
- Obianyo, I. I., Ihekwe, G. O., Mahamat, A. A., Onyelowe, K. C., Onwualu, A. P., & Soboyejo, A. B. O. (2021). Overcoming the obstacles to sustainable housing and urban development in Nigeria: The role of research and innovation. *Cleaner Engineering and Technology*, 4, 100226.

- Pagliarin, S. (2018). Linking processes and patterns: Spatial planning, governance and urban sprawl in the Barcelona and Milan metropolitan regions. *Urban Studies*, 55(16), 3650–3668.
- Patterson, J., Schulz, K., Vervoort, J., Van Der Hel, S., Widerberg, O., Adler, C., Hurlbert, M., Anderton, K., Sethi, M., & Barau, A. (2017). Exploring the governance and politics of transformations towards sustainability. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 24, 1–16.
- Perry, J. L., De Graaf, G., Van der Wal, Z., & Van Montfort, C. (2014). Returning to Our roots: “good government” evolves to “good governance.” *Public Administration Review*, 74(1), 27–28.
<https://doi.org/10.1111/puar.12164>
- Poorahmad, A. (2018). Good urban governance in urban neighborhoods (case: Marivan city). In *Good urban governance in urban neighborhoods (case: Marivan city): Poorahmad, Ahmad*.
- Sandholz, S., & Sandholz, S. (2017). Urban Regeneration. *Urban Centres in Asia and Latin America: Heritage and Identities in Changing Urban Landscapes*, 103–134.
- Seyedalhosseini, S. M. (2016). Evaluating the Performance of Municipality in Terms of Good Urban Governance (Case Study: District 1 and 3 of Zahedan City). *Asian Social Science*, 12(9), 1–77.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sungena, T. N., Serbeh-Yiadom, K. C., & Asfaw, M. (2014). Strengthening good governance in urban land management in Ethiopia: A case-study of Hawassa. *Journal of Environment and Earth Science*, 4(15), 96–108.
- Tan, B. A., Gaw, L. Y.-F., Masoudi, M., & Richards, D. R. (2021). Nature-based solutions for urban sustainability: an ecosystem services assessment of plans for Singapore’s first “forest town.” *Frontiers in Environmental Science*, 9, 610155.
- Toh, B. K. (2015). *The Role Of Urban Governance In The Rapid Development Of Singapore, 1959-Present**.

Van den Dool, L., Hendriks, F., Gianoli, A., & Schaap, L. (2015). *The quest for good urban governance: Theoretical reflections and international practices*. Springer.

Verrest, H., Moorcroft, S., & Mohammed, A. (2013). Global

urban development programmes and local realities in the Caricom-Caribbean: mismatches in needs and approach. *Habitat International*, 40, 258–267.